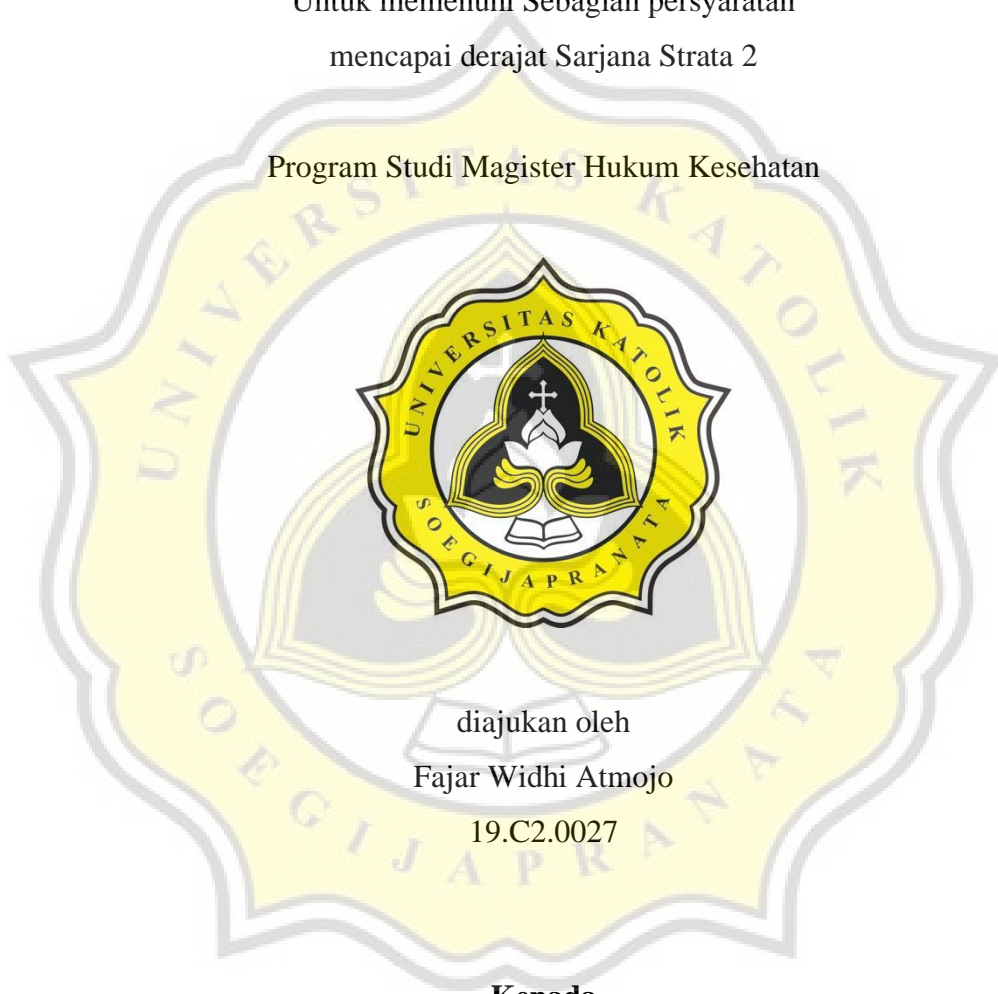


**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI JAWA  
TENGAH DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN  
JIWA PERAWAT DI MASA PANDEMI COVID-19**

**TESIS**

Untuk memenuhi Sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana Strata 2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



diajukan oleh  
Fajar Widhi Atmojo  
19.C2.0027

**Kepada**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2023**

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN JIWA PERAWAT DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh: Fajar Widhi Atmojo

Tingginya kasus Covid-19 mengakibatkan perawat sebagai garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 mengalami krisis kesehatan fisik dan krisis kesehatan mental. Hal ini muncul diakibatkan oleh adanya permasalahan pemenuhan hak atas kesehatan jiwa. Permasalahan kesehatan jiwa di Provinsi Jawa Tengah adalah adanya perawat yang merasa dirinya tidak mampu untuk menghadapi pandemi dan memilih untuk mengundurkan diri, adanya *burnout* akibat pekerjaan, kelelahan, stres, khawatir dan kejenuhan sehingga mengakibatkan turunnya imunitas perawat. Pemerintah bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas kesehatan tersebut, termasuk hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peraturan, pelaksanaan dan bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi dekritif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder melalui wawancara kepada Wakil Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan masih terdapat kekosongan hukum tentang pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19 dan kekuatan hukum yang belum jelas dan mengikat. Peraturan tentang pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat tersebut hanya berupa peraturan kebijakan (*beleidsregels*). Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19 adalah dengan bekerjasama dengan IPKJI Jawa Tengah, namun belum ada peraturan jelas yang menunjukkan bahwa IPKJI Jawa Tengah adalah badan khusus yang dipilih sebagai pelaksana DKJPS di masa pandemi Covid-19. Permasalahan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bentuk pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat belum diatur secara spesifik, hanya hak atas kesehatan jiwa untuk masyarakat umum.

Kata kunci: tanggung jawab pemerintah daerah, hak kesehatan jiwa, perawat, Covid-19.

## **ABSTRACT**

### **THE RESPONSIBILITY OF THE CENTRAL JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT IN ENSURING THE RIGHTS TO MENTAL HEALTH OF NURSES DURING THE COVID-19 PANDEMIC**

**By: Fajar Widhi Atmojo**

The high number of Covid-19 cases has resulted in nurses being at the forefront of handling the Covid-19 pandemic, experiencing physical and mental health crises. This arises due to issues concerning the fulfillment of mental health rights. In the province of Central Java, the mental health issues among nurses include feeling incapable of facing the pandemic and choosing to resign, experiencing burnout due to work pressure, fatigue, stress, worry, and boredom, leading to a decrease in nurses' immunity. The government is responsible for ensuring the fulfillment of this right, including the mental health rights of nurses during the Covid-19 pandemic. This research aims to explore the regulations, implementation, and forms of government responsibility in fulfilling the mental health rights of nurses during the Covid-19 pandemic.

The research was conducted in the province of Central Java, using a socio-legal approach with descriptive-analytical specifications. The data used in the research were primary and secondary data obtained through interviews with the Vice Chairman of the Regional Regulation Formation Agency of the Central Java Provincial Legislative Council, the Head of Infection Prevention and Control of the Central Java Provincial Health Office, and the Indonesian Mental Health Nurses Association of the Central Java Province. The data from the research were analyzed using qualitative methods.

The results of the research indicate that there is still a legal vacuum regarding the fulfillment of nurses' mental health rights during the Covid-19 pandemic, and the legal strength is not clear and binding. The regulations concerning the fulfillment of nurses' mental health rights only take the form of policy regulations (beleidsregels). The implementation of the responsibility of the Central Java Provincial Government in fulfilling the mental health rights of nurses during the Covid-19 pandemic is done in collaboration with the Indonesian Mental Health Nurses Association of Central Java, but there is no clear regulation indicating that the association is a special body selected as the implementer of mental health services during the Covid-19 pandemic. Another issue found in this research is that the specific form of fulfilling nurses' mental health rights is not regulated, and it is only mentioned for the general public.

Keywords: local government responsibility, mental health rights, nurses, Covid-19.